

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal 19	Selasa, 21 Januari 2020	Sejumlah Tol Baru Siap Beroperasi	Sekitar 300 KM di lima ruas tol baru di Trans Sumatra akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini, sementara ratusan KM jalan tol lainnya segera selesai konstruksinya
2	Bisnis Indonesia, Hal 22	Selasa, 21 Januari 2020	Pemerintah Guyur Rp 200 Miliar	Pelabuhan khusus logistik akan dibangun di daerah Labuan Bajo, NTT. Pembangunan tahap I akan menggunakan APBN sebesar Rp 200 miliar
3	Bisnis Indonesia, Hal 7	Selasa, 21 Januari 2020	DKI Kebut Pembebasan 234 Hektare Lahan	Pemprov DKI mempercepat pembebasan lahan seluas 234 hektare untuk pembangunan waduk dan situ hingga akhir 2020
4	Kompas, Hal 16	Selasa, 21 Januari 2020	Target 2023, Labuan Bajo Tuan Rumah KTT G-20	Mimpi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superpremium mensyaratkan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia setempat
5	Kompas, Hal 18	Selasa, 21 Januari 2020	Infrastruktur Bekasi Buruk	Ada 9,686 ruang kelas SDN dan SMP yang rusak. Jumlah yang layak digunakan hanya 3,198 ruang kelas
6	Media Indonesia, Hal 11	Selasa, 21 Januari 2020	Pengembangan tanggul Harus Hindari Kepentingan Properti	Pembangunan NCICD diminta menjauhi kepentingan bisnis sektor properti
7	Media Indonesia, Hal 11	Selasa, 21 Januari 2020	Berita Foto	Rumah Khusus Nelayan yang baru selesai dibangun Kementerian PUPR di Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 19/1/2020. Ditjen Penyediaan Perumahan hingga 2019 telah membangun rumah khusus nelayan bertipe rumah tapak sebanyak 9,833 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,36 triliun
8	Media Indonesia, Hal 11	Selasa, 21 Januari 2020	Lima Kawasan di Labuan Bajo Mulai Ditata	Presiden Jokowi meminta pengembangan destinasi wisata superpremium Labuan Bajo mulai dibenahi pada awal tahun ini
9	Media Indonesia, Hal 2	Selasa, 21 Januari 2020	Berita Foto	Kondisi salah satu ruangan di SDN Samudrajaya di Kabupaten Bekasi, Senin (21/1/2020). Ruang kelas rusak parah dan tak layak pakai.
10	Koran Tempo	Selasa, 21 Januari 2020	Jokowi Perintahkan Penataan Lima Zona di Labuan Bajo	Pemerintah membangun Bandara Komodo dan pelabuhan logistik

Judul	Sejumlah Tol Baru Siap Beroperasi	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 19		
Resume	Sekitar 300 KM di lima ruas tol baru di Trans Sumatra akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini, sementara ratusan KM jalan tol lainnya segera selesai konstruksinya		

► INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

# Sejumlah Tol Baru Siap Beroperasi

Bisnis, JAKARTA — Sekitar 300 kilometer di lima ruas tol baru di Trans Sumatra akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini, sementara ratusan kilometer jalan tol lainnya segera selesai konstruksinya.

Ajengnas Bari T.  
redaksi@bisnis.com

Adapun kelima ruas tersebut adalah Tol Sigi-Banda Aceh sepanjang 74 km, Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia-Simpang Susun Tanjung Molla) sepanjang 6,27 km, Pekanbaru-Dumai (131,4 km), Padang-Pekanbaru segmen Seksi 1 Padang-Sicinin (4,2 km), dan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan seksi 3 (Jakabaring-Betung) sepanjang 69,19 km.

Dua di antara lima ruas tol tersebut serta satu tol di Trans Sulawesi, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, akan diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Tiga ruas tol yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini yakni Tol Marado-Bitung, Pekanbaru-Dumai, dan Palembang-Kayu Agung," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Ruas Tol Marado-Bitung sepanjang 39 km diketahui sudah mulai beroperasi pada 20 Desember 2019 guna mendukung lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Senada, Seksi 1 Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Palembang-Kayu Agung sudah mulai dimanfaatkan fungsional pada Desember 2019.

Selain ruas tol yang akan diresmi-

kan, Kementerian PUPR juga menargetkan pekerjaan konstruksi sekitar 150 kilometer ruas tol sudah tuntas pada tahun ini.

Boris merangkum beberapa konstruksi ruas tol yang ditargetkan tuntas tahun ini di antaranya Seksi 3 Tol Kuala Tanjung-Tebingtinggi-Parapat yakni ruas Tebing Tinggi-Serbelawan sepanjang 30 km dan Seksi 1 yakni ruas Tebing Tinggi-Indrapura sepanjang 20,40 km. Keduanya ditargetkan selesai pada Desember 2020.

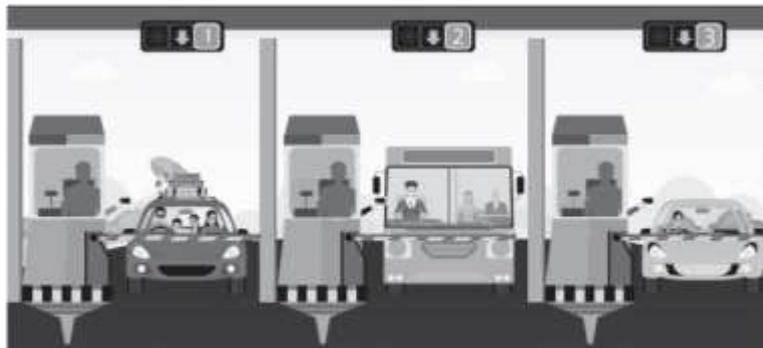
Selain itu, enam ruas tol di koridor JORR 2 sepanjang 111,37 kilometer ditargetkan selesai pada Maret 2020.

Keenam ruas tersebut adalah Cengkareng—Kunciran (14,20 km), Kunciran—Serpong (11,14 km), Serpong—Cinere (10,14 km), Cinere—Jagorawi (14,70 km), Cimanggis—Cibitung (25,21 km), dan Cibitung—Cibinincing (34,01 km).

#### TOL CISUMDAWU

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Damar Parikesit mengatakan pembangunan jalan tol Cikunyah-Sumadang-Daruyan atau Cisumdawu bisa rampung pada akhir 2020.

Konstruksi jalan tol Cisumdawu yang melintasi perbukitan memang menantang. Bahkan, proyek ini harus membuat terowongan sepanjang 472 meter. "Ini juga menjadi penunjang Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka dan menjadi salah satu akses yang mempercepat kendaran logistik menuju Pelabuhan Patimban," tutur Damar.  
Direktur Utama PT Jasamarga Ja-



## Jalan Baru Tol Beroperasi 2020

Ruas Tol	Panjang (km)	BU/PT	Konstruksi Tuntas/Beroperasi
Paket 3 Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang - Jalan Industri)	8,7	PT Jasamarga Japek Selatan	Mai 2020
Tol Ruas Tanjung Tebingtinggi-Parapat (Seksi 1 & 2)	50,4	PT Hutama Karya	Desember 2020
Cengkareng-Kunciran	14,20	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Maret 2020
Kunciran-Serpong	11,14	PT Marga Trans Nusantara	Sudah beroperasi
Serpong-Cinere	10,14	PT Cisera Serpong Jaya	Maret 2020
Cinere-Jagorawi	14,70	PT Transloggar KRA Jaya	Maret 2020
Cimanggis-Cibitung	25,21	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Maret 2020
Cibitung-Cibinincing	34,01	PT Cibitung Tarling Priak Peri Tollways	Maret 2020
Sigi-Banda Aceh	74,0	PT Hutama Karya	Hingga Desember 2020
Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia-Simpang Susun Tanjung Molla)	6,27	PT Hutama Karya	Hingga Desember 2020
Pekanbaru-Dumai	131,4	PT Hutama Karya	Hingga Desember 2020
Padang-Pekanbaru Seksi 1 Padang-Sicinin	4,2	PT Hutama Karya	Hingga Desember 2020
Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan seksi 3 (Jakabaring-Betung)	69,19	PT Hutama Karya	Hingga Desember 2020

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR

©2020 PUPR/BU

pek Selatan kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dedi Kristiawan Sumoto optimistis sebagian Paket 3 jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan yakni sepanjang 27,85 km

dapat dilintasi pada Idulfitri 2020 secara fungsional.

Ruas dari Paket 3 yang berfungsi pada Lebaran 2020 adalah sepanjang 8,7 kilometer yakni dari Sadang hingga

Jalan Industri.

Pengguna Jalan Tol Purbaleunyi dari arah Bandung menuju ke Jakarta, katanya, bisa keluar di Simpang Susun Sadang. (Bharu Maulana)

► Dua ruas jalan tol Trans Sumatra serta satu tol di Trans Sulawesi akan diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Judul	Pemerintah Guyur Rp 200 Miliar	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 22		
Resume	Pelabuhan khusus logistik akan dibangun di daerah Labuan Bajo, NTT. Pembangunan tahap I akan menggunakan APBN sebesar Rp 200 miliar		

## ► PELABUHAN KHUSUS LOGISTIK NTT

# Pemerintah Guyur Rp200 Miliar

Bisnis, LABUAN BAJO — Pelabuhan khusus logistik atau *multipurpose* akan dibangun di daerah Waikelambu, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan tahap I menggunakan APBN sebesar Rp200 miliar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pengerjaan pembangunan tersebut akan digarap secara *multiyears*. Namun, pembangunan tahap awal ditargetkan selesai pada Desember 2020 dengan anggaran Rp200 miliar.

Lokasi Pelabuhan Logistik yang akan dibangun hanya 19 menit waktu tempuh dari Bandara Komodo dan dari Pelabuhan Labuan Bajo yang lama hanya sekitar 30 menit.

Untuk Pelabuhan Lama, lanjut Menhub, akan dijadikan pelabuhan khusus penumpang dengan fasilitas *promenade* atau tempat untuk berjalan-jalan sepanjang kurang lebih 1 km. Pelabuhan penumpang ini

diproeksikan menjadi pusat turis yang akan berangkat dan kembali dari Pulau Komodo atau pulau lainnya.

“Kita memberikan prioritas bagi wisata, dunia wisata dalam kegiatannya. Identifikasinya yang kita lakukan waktu itu, [Kawasan Marina Labuan Bajo] begitu indah tetapi ada tumpang tindih fungsinya, fungsi penumpang dan fungsi logistik,” paparnya, Minggu (19/1) malam.

Menurutnya, menjadi kurang elok ketika pemandangan dari atas sudah begitu indah tetapi berdekatan dengan kegiatan logistik. Namun, kegiatan logistik juga penting, karena tanpa logistik, pariwisata juga tidak berdaya.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan untuk memisahkan antara [kegiatan] logistik dan penumpang. Cari lokasi, kami dapat di Waikelambu. Pelindo III membebaskan tanah, tetapi konstruksi dari APBN.

Kami harapkan Desember 2020 selesai,” terangnya.

Dia menegaskan pelabuhan logistik berkapasitas 100.000 TEUs tersebut akan dikelola oleh Pelindo III dengan rincian skema konsesi yang tanahnya diserahkan ke pemerintah, lalu pemerintah membangun, kemudian dikembalikan kepada Pelindo III untuk konsesi 30 tahun.

Guna memaksimalkan pariwisata di Kawasan Marina Labuan Bajo, aktivitas terminal penumpang dan peti kemas dipisahkan dari dermaga penyeberangan yang lokasinya masih di kawasan pariwisata premium tersebut.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati mengatakan pemisahan kapal kargo dengan kapal ferry penumpang dan kendaraan dilakukan karena adanya wacana terminal *cruise* di pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo. (Rinaldi M. Azka)

Judul	<b>DKI Kebut Pembebasan 234 Hektare Lahan</b>	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal 7		
Resume	Pemprov DKI mempercepat pembebasan lahan seluas 234 hektare untuk pembangunan waduk dan situ hingga akhir 2020		

## ► PENANGANAN BANJIR

# DKI Kebut Pembebasan 234 Hektare Lahan

Bisnis, JAKARTA — Pemprov DKI mempercepat pembebasan lahan seluas 234 hektare untuk pembangunan waduk dan situ hingga akhir 2020.

► Potensi waduk dan situ yang bisa dibangun di ibu kota diprediksi mencapai 815 hektare.

Feni Freycinetia  
feni.freycinetia@bisnis.com

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan total ada 117 waduk, situ, dan embung di ibu kota saat ini. Adapun, waduk yang menjadi pengendali banjir Jakarta tersebar di 23 lokasi.

"Waduk dan situ yang sudah dibebaskan dan perlu dibangun seluas 213 hektare. Sisa lahan yang harus dibebaskan hingga akhir 2020 seluas 234 hektare. Sementara itu, sekitar 168 hektare waduk perlu direvitalisasi," katanya ketika dikonfirmasi, Minggu (19/1).

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air, DKI Jakarta harus memiliki rasio luasan air (*water ratio*) yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) 5% dari total luas daratan atau sekitar 331 hektare.

Juaini mengungkapkan bahwa potensi waduk dan situ yang bisa dibangun di ibu kota diprediksi mencapai 815 hektare. Waduk-waduk tersebut menampung aliran beberapa sungai, yaitu Sunter, Cipinang, Grogol, dan Krukut Pesanggrahan.

Meski anggaran untuk pembebasan lahan waduk, situ, dan embuk dihapus, Dinas Sumber Daya Air ternyata tetap mengalokasikan dana pada APBD DKI 2020. "Anggaran tetap ada Rp670 miliar. Itu untuk semua pembebasan lahan, termasuk waduk, situ, dan sepanjang aliran sungai. Ciliwung juga termasuk," imbuhnya.

Selain pembebasan lahan, Juani

mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan program naturalisasi di beberapa lokasi, antara lain Pondok Rangun, Kampung Rambutan, Cimanggis, Sunter, dan Brigif Cijantung.

Menurutnya, sebagian titik yang telah dinormalisasi sudah berfungsi dan tinggal tahap penyelesaian atau finalisasi. Dia menambahkan Pemprov DKI juga tetap menjalankan pembangunan sumur resapan atau lubang biopori untuk menambah serapan air hujan agar mengurangi dampak banjir.

Menurutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI telah membangun 1.200 titik sumur resapan hingga akhir 2019. Tahun ini, Juaini menargetkan menambah 3.000 titik sumur resapan untuk dilelang melalui e-katalog. Nantinya sumur resapan akan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Jakarta.

"Masing-masing sudin [suku dinas] punya anggaran sendiri. Total anggaran pembangunan sumur resapan sekitar Rp100 miliar untuk lima wilayah."

### SEGERA KERJAKAN

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan Pemprov DKI belum memaparkan konsep tersebut kepada anggota dewan.

Padahal, rencana penanganan banjir sangat mendesak untuk dieksekusi. Dia juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih baik antara normalisasi atau naturalisasi.

"Yang penting, apapun konsepnya harus segera dikerjakan. Sebaiknya

Pemprov DKI segera paparkan konsep naturalisasi sungai ke DPRD agar semua pihak memahami," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa Anies telah mengeluarkan Pergub No. 31/2019 tentang Naturalisasi Sungai. Di dalam Pergub ini dituliskan bahwa naturalisasi sungai bertujuan untuk mengalirkan air langsung ke hilir dengan melakukan perbaikan prasarana sumber daya air dan menghidupkan kembali ekosistem di sekitar kawasan sungai.

Setelah pelajari, Justi menilai bahwa beleid tersebut belum menggambarkan detail konsep naturalisasi sungai. Salah satunya soal kebutuhan lahan. Jika dibandingkan dengan normalisasi, naturalisasi sungai membutuhkan lahan yang lebih lebar.

Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp136,8 miliar pada 2020. Di sisi lain, pada masa kampanye, Gubernur Anies telah berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran.

"Jangan-jangan naturalisasi ini nanti dilakukan di sungai yang sudah lebar. Terus, ujung-ujungnya cuma bikin taman Instagramable di pinggir sungai untuk foto-foto. Buang-buang anggaran dan tetap akan banjir," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub No. 31/2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Namun, diperkirakan konsep naturalisasi ini membutuhkan lahan yang lebar sebesar 80 m—90 m termasuk sempadan sungai. 📍

Judul	Target 2023, Labuan Bajo Tuan Rumah KTT G-20	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 16		
Resume	Mimpi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superpremium mensyaratkan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia setempat		

# Target 2023, Labuan Bajo Tuan Rumah KTT G-20

Mimpi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superpremium mensyaratkan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia setempat.

**MANGGARAI BARAT, KOMPAS** — Labuan Bajo terus dibenahi untuk menjadi destinasi wisata superpremium. Bahkan, pemerintah menargetkan Labuan Bajo pada 2023 menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 dan ASEAN.

Kendati memiliki alam yang indah dan keberadaan komodo sebagai daya tarik, pembenahan secara menyeluruh dan secepatnya masih harus dilakukan di Labuan Bajo. Sampah plastik, misalnya, masih banyak dijumpai di pantai dan laut.

"Saya mendapat keluhan (soli sampah) dari yang datang dan *diving* ke sini. Meskipun belum banyak, harus segera dibersihkan," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas pengembangan wisata Labuan Bajo, di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/1/2020).

Rapat dihadiri antara lain Menpar Wishnutama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Kepala

BNPB Doni Monardo, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya Bagus Puruhito.

Presiden meminta Kementerian LHK menangani sampah di karang dan laut. Adapun Kementerian PUPR diminta menyiapkan insinerator dan sistem pengelolaan sampah di darat serta membangun infrastruktur air bersih.

Presiden juga menekankan penataan kawasan. Penataan yang baik membuat wisatawan nyaman dan menjadikan lokasi ini superpremium.

"Oleh sebab itu, perlu sekali melakukan integrasi, baik kerapian, kebersihan, kenyamanan, maupun keamanan bagi wisatawan," kata Presiden.

Sejauh ini, wilayah wisata di Labuan Bajo dibagi lima zona, yakni Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, kawasan Marina, dan Kampung Ujung. Kapal-kapal wisata mulai banyak yang singgah di sini.

Presiden berharap, kedatangan wisatawan yang menggunakan kapal itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. "Jangan sampai hanya masuk,

buang sampah saja, tetapi masyarakat tidak menikmati sukunya kapal-kapal besar ini," kata Presiden.

## Infrastruktur pendukung

Terkait target pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan KTT G-20 dan ASEAN pada 2023, sejumlah infrastruktur pendukung terus dibangun. Fasilitas hotel ditambah dan bandara dibenahi.

Pemerintah tengah menyiapkan perluasan landas pacu dan terminal bandara. Budi Karya mengatakan, pembangunan landas pacu dan perluasan terminal bandara segera dilakukan setelah pembebasan lahan selesai. Landas pacu yang baru disiapkan sepanjang 2.750 meter sehingga pesawat berbadan besar seperti Airbus A300 bisa mendarat.

Pelabuhan multiguna Wae Kelambu juga tengah dibangun. Pelabuhan dirancang memiliki terminal peti kemas berkapasitas 10.000 TEUs dan pelabuhan kargo curah cair. Pelabuhan yang ada saat ini hanya berkapasitas 4.000 TEUs.

Kemarin, Presiden meninjau lokasi Pelabuhan Wae Kelambu serta pembangunan *creative hub* di Puncak Waringin. Presiden yang didampingi Nyonya Iriana juga meresmikan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo. Di kawasan ini terdapat hotel setara bintang empat yang dibangun PT ASDP bersama PT Pembangunan Perumahan. Di kawasan ini disiapkan area komersial serta masih akan dibangun dermaga kapal pesiar dan terminal penyeberangan.

Adapun di Puncak Waringin, pemerintah membangun *creative hub* untuk menggarap produk-produk lokal, baik dari sisi kemasan, desain, maupun sisi harga. Presiden berharap, usaha mikro dan kecil tenun, kopi, kerajinan, dan makanan khas bisa tumbuh. Kesenian dan budaya lokal juga bisa hidup dan menghidupkan Labuan Bajo.

## Sumber daya manusia

Masalah kemampuan sumber daya manusia di NTT juga menjadi perhatian Presiden. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga agar sesuai

dengan kebutuhan industri pariwisata. Dengan demikian, baik masyarakat setempat maupun usaha mikro dan kecil dapat menikmati dan disertakan dalam pembangunan pariwisata.

Tidak hanya itu, Presiden juga meminta Gubernur NTT dan bupati untuk membantu penyelesaian sengketa lahan. Sebab, masalah sengketa lahan berpotensi menghambat investasi. "Selaraskan hukum adat yang ada dan hukum positif," kata Presiden kepada kepala daerah.

Masalah keamanan para wisatawan juga menjadi perhatian Presiden, terutama kesiapan personel BNPB dan Basarnas. Menyikapi hal itu, Doni Monardo mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan peningkatan kapasitas kelembagaan, personel, dan manajemen BPBD. Untuk mengantisipasi potensi bencana, setidaknya BPBD di Labuan Bajo harus memiliki ahli di bidang tsunami, geologi, vulkanologi, dan hidrologi.

Seluruh pembenahan di Labuan Bajo ditargetkan rampung akhir 2020, dilanjutkan dengan promosi wisata. (INA)

Judul	<b>Infrastruktur Bekasi Buruk</b>	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 18		
Resume	Ada 9,686 ruang kelas SDN dan SMP yang rusak. Jumlah yang layak digunakan hanya 3,198 ruang kelas		

# Infrastruktur Bekasi Buruk

Pada 2019 di Kabupaten Bekasi ada 9.686 ruang kelas tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang rusak. Jumlah yang layak digunakan hanya 3.198 ruang kelas.

**BEKASI, KOMPAS** — Sebuah unggahan video viral karena memperlihatkan murid Sekolah Dasar Negeri Samudrajaya 04, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, tengah memohon kepada para pejabat di daerahnya agar memperbaiki sekolah mereka yang rusak.

Jika dilihat di peta, sekolah dasar ini letaknya hanya 8 kilometer dari pertbatasan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang tak jauh dari segala macam kemajuan bangsa ini.

Pada Senin (20/1/2020), tampak kerusakan di mana-mana. Selain atap dan plafon yang berlobang, sebagian keramik lantai sekolah tersebut juga terlepas.

Pada musim hujan, siswa SDN Samudrajaya 04 yang berjumlah sekitar 280 orang sering diliburkan karena banjir. Anak-anak di sekolah itu juga biasanya langsung meninggalkan kelas saat hujan lebat ka-

rena atap sekolah bocor.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tahun 2019, sekolah yang perlu diperbaiki jumlahnya sangat banyak. Total ada 9.686 ruang kelas tingkat SD dan SMP yang rusak. Angka ini lebih banyak jumlahnya dari ruang kelas yang layak pakai untuk tingkat SMP dan SD hanya 3.198 ruang kelas.

"Kami berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih selektif menentukan sekolah yang akan dibangun dan memprioritaskan sekolah yang kondisinya urgent," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwindu, kemarin.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bekasi, jumlah ruang kelas tingkat SD di daerah itu yang rusak sebanyak 3.978 kelas. Adapun untuk tingkat SMP, total ada 5.708 ruang kelas yang rusak, dengan persentasen 334 rusak sedang, 481

rusak berat, dan 4.693 rusak ringan.

## Diprioritaskan

Terkait kondisi bangunan SDN Samudrajaya 04, Carwindu mengatakan, kondisi sekolah itu kian parah lantaran terdampak banjir dua minggu lalu. Diras pendanaan sedang berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi agar renovasi sekolah itu dijadikan prioritas pada 2020. "Pembangunan infrastruktur sekolah menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Semoga SDN Samudrajaya 04 menjadi prioritas pada tahun ini," katanya.

Berdasarkan pengamatan, kemarin, kondisi bangunan SDN Samudrajaya 04 memprihatinkan. Sebagian besar atap dan plafon gedung SD itu berlobang. Sedikitnya ada empat gedung kelas SD ini yang rusak parah.

Genting hingga plafon empat ruang kelas itu berlobang

sehingga sinar matahari menembus hingga lantai dasar. Beberapa jendela ruang kelas itu juga terbuka lantaran kaca perutupannya pecah. Ruang kelas berlumut. Sebagian keramik sudah terkelupas menampilkan permukaan tanah yang biasanya tertutup. Beberapa buku pelajaran siswa mumpuk di atas meja dalam kondisi basah, sobek, atau terkena lumpur.

Kepala SDN Samudrajaya 04 Aeli Siswanto mengatakan, beberapa hari lalu Dinas PUPR sudah mengadakan survei. Menurut rencana, renovasi total sekolah itu akan dimulai pada Juni atau Juli 2020.

"Kami sudah mengajukan (usulan perbaikan) diri tahun lalu dan akan direalisasikan tahun ini," ucapnya.

SDN Samudrajaya 04 memang rutin mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) setiap tahun. Namun, anggaran itu tidak diperbole-

kan untuk renovasi sehingga selama ini dimanfaatkan untuk pemeliharaan. "Dana BOS yang kami dapat itu satu tahun Rp 586 juta atau sesuai jumlah murid. Satu murid mendapat Rp 800.000 per tahun," ujar Aeli.

Kartika (36), salah satu orangtua siswa SDN 04 Samudrajaya, mengatakan, sejumlah ruang kelas berlumut lantaran dua minggu lalu sekolah itu dilanda banjir setinggi sekitar 30 sentimeter. Saat itu, semua siswa diliburkan hingga banjir surut. "Tidak banjir pun, saat hujan, murid di sini pasti disuruh pulang lebih awal. Itu artinya sudah bocor, hujan pasti air merembes," katanya.

Menurut Ketua Komite Sekolah SDN Samudrajaya 04 Sahara, empat gedung sekolah yang rusak parah itu merupakan gedung yang digunakan siswa kelas IV, V, dan VI. Sebagian bangunan kelas I, II, dan III atapun juga berlobang (VAN)



Kondisi salah satu ruangan di Sekolah Dasar Negeri Samudrajaya 04, Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin (20/1/2020). Sedikitnya empat ruang kelas di SDN ini rusak parah. Ruang kelas lain juga tak sepenuhnya layak pakai.

Judul	<b>Pengembangan tanggul Harus Hindari Kepentingan Properti</b>	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 11		
Resume	Pembangunan NCICD diminta menjauhi kepentingan bisnis sektor properti		

# Pengembangan Tanggul Harus Hindari Kepentingan Properti

PEMBANGUNAN *national capital integrated coastal development* (NCICD) atau tanggul laut Jakarta diminta menjauhi kepentingan bisnis sektor properti.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemenuh Abdul Halim menginginkan pemerintah pusat tidak mengembangkan wacana pembangunan NCICD. Ia menilai proyek tersebut sarat dengan kepentingan pengem-

bang berkelas mewah.

Untuk itu, ia menolak gagasan NCICD tersebut dan mendesak pemerintah mengedepankan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta yang ramah secara ekologis dan berorientasi humanis.

Dengan kata lain, pengelolaan masyarakat yang hidup di tepi pantai harus bisa memerdekakan manusia di kawa-

san pesisir tersebut.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang penerapan sistem polder dapat menjadi solusi utama penanggulangan banjir di DKI Jakarta, selain normalisasi sungai dan pembersihan drainase.

"Saya kira satu-satunya mungkin, ya, cara penanggulangan banjir di Jakarta de-

ngan sistem polder itu," kata pakar hidrologi yang juga pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik UGM, Prof Bambang Triatmodjo, di Yogyakarta, baru-baru ini.

Pembangunan sistem polder antara lain seperti diterapkan di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sistem polder itu mampu membuat perumahan elite yang berada minus 2 meter di bawah permukaan air laut tetap terlindungi dari potensi banjir.

Karena itu, menurut Bambang, Pemprov DKI Jakarta perlu menempatkan sistem polder yang merupakan kom-

binasi tanggul dan pompa itu di sejumlah titik menyesuaikan dengan peta genangan dari Dinas PU setempat.

Pakar teknik sumber daya air UGM, Prof Budi Santoso, menjelaskan seperti yang diterapkan di Belanda, sistem polder ialah membuat tanggul mengelilingi kota agar air tidak kemasukan air. Adapun air yang di dalam tanggul dikumpulkan, kemudian dipompa ke luar dan dialirkan ke laut.

Menurut dia, sistem itu biasanya diterapkan di sejumlah tempat dengan ketinggian muka air tanah lebih rendah jika dibandingkan dengan muka air laut. (Ant/S-5)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 11		
Resume	Rumah Khusus Nelayan yang baru selesai dibangun Kementerian PUPR di Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 19/1/2020. Ditjen Penyediaan Perumahan hingga 2019 telah membangun rumah khusus nelayan bertipe rumah tapak sebanyak 9,833 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,36 triliun		



ANTARA/IGGOY EL FITRA

**RUMAH KHUSUS NELAYAN:** Rumah khusus nelayan yang baru selesai dibangun Kementerian PU-Pera di Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (19/1). Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera hingga 2019 telah membangun rumah khusus nelayan di Indonesia bertipe rumah tapak sebanyak 9.833 unit, dengan nilai anggaran sebesar Rp1,36 triliun.

Judul	<b>Lima Kawasan di Labuan Bajo Mulai Ditata</b>	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 11		
Resume	Presiden Jokowi meminta pengembangan destinasi wisata superpremium Labuan Bajo mulai dibenahi pada awal tahun ini		

## Lima Kawasan di Labuan Bajo Mulai Ditata

PRESIDEN Joko Widodo meminta pengembangan destinasi wisata superpremium Labuan Bajo mulai dibenahi pada awal tahun ini. Presiden menetapkan sedikitnya lima zona atau kawasan yang perlu ditata dengan target mendatangkan wisatawan berpengeluaran besar.

"Semuanya ini kita siapkan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai sehingga di 2021 Kementerian Pariwisata bisa langsung promosi besar-besaran," ujar

Jokowi sesuai rapat terbatas membahas pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Presiden menyampaikan pekerjaan besar penataan destinasi di Labuan Bajo harus diselesaikan tahun ini, seperti infrastruktur, pembenahan lanskap, sampah, serta ketersediaan air baku. Penataan perlu dipersiapkan dari sekarang agar Labuan Bajo siap digunakan sebagai tempat per-

helatan G-20 dan ASEAN Summit pada 2023.

Presiden menyampaikan lima kawasan yang perlu ditata ialah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, kawasan marina, dan zona Kampung Ujung.

Kelima zona itu akan ditata menjadi sebuah ruang publik yang berkaitan untuk menciptakan lanskap indah dan menjadi penggerak pembangunan serta pusat aktivitas masyarakat di

Labuan Bajo.

Presiden mengatakan fasilitas penginapan untuk hotel juga perlu ditambah meski di sana sudah ada beberapa hotel berbintang dengan berbagai fasilitas.

Jokowi pun berpesan agar masyarakat setempat harus dipastikan turut ambil bagian dalam pengembangan wisata tersebut. Ia menginginkan masyarakat lokal menikmati dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan.

Turut hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Di samping itu, ada Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula. (Dhk/JL/PO/X-10)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 2		
Resume	Kondisi salah satu ruangan di SDN Samudrajaya di Kabupaten Bekasi, Senin (21/1/2020). Ruang kelas rusak parah dan tak layak pakai.		



ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

**RUANG KELAS RUSAK:** Para murid mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas yang lantai dan atapnya rusak di SDN Samudrajaya 04 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Menurut pihak sekolah, sejak enam tahun tiga ruang kelas di sekolah tersebut rusak dan belum ada perbaikan sama sekali.

Judul	Jokowi Perintahkan Penataan Lima Zona di Labuan Bajo	Tanggal	Selasa, 21 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal. 2		
Resume	Pemerintah membangun Bandara Komodo dan pelabuhan logistik		

CRONOPEL DAN RESUME

## Jokowi Perintahkan Penataan Lima Zona di Labuan Bajo

Pemerintah membangun Bandara Komodo dan pelabuhan logistik.

2020, 21 JANUARI 2020



Presiden Joko Widodo (duduk) dan jajarannya saat menghadiri pertemuan Menteri Labuan Bajo di Hotel Inopa Bay Komodo, Labuan Bajo, Minggu (19/1/2020). (Foto: Tempo)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan penataan lima zona di kawasan wisata super-prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lima zona itu adalah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta Kampung Ujung. "Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan landscape indah, penggerak pembangunan kawasan, serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo," kata Jokowi, seperti dilansir Sekretariat Negara, kemarin.

Jokowi menginstruksikan hal tersebut dalam rapat pengembangan destinasi wisata super-prioritas Labuan Bajo di Hotel Plataran Komodo, kemarin. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bagus Puruhito.

Ada juga kepala daerah setempat, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula. Kepada para kepala daerah itu, Jokowi mengatakan banyak tanah sengketa di Labuan Bajo yang harus diselesaikan demi menarik investor. "Selaraskan antara hukum adat dengan hukum positif yang kita miliki," kata dia.

Menurut Jokowi, kawasan Labuan Bajo harus menjadi destinasi wisata super-premium dan pengembangannya dimulai pada awal 2020. Karena itu, dia meminta pembangunan infrastruktur juga dipercepat. Salah satunya pembenahan landasan pacu dan terminal penumpang di Bandara Komodo. Jokowi berharap lalu lintas pesawat dan kunjungan penumpang di bandara tersebut segera meningkat. "Tapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk G20 dan ASEAN Summit pada 2023."

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tengah mengembangkan Bandara Komodo bersama swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pengembangan bandara tersebut membutuhkan investasi Rp 1,2 triliun. Menurut dia, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penambahan fasilitas bandara di sisi darat maupun udara serta operasional.

Melalui skema KPBU, pihak swasta akan memelihara infrastruktur bandara selama 25 tahun. Setelah masa kerja sama berakhir, swasta wajib menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan menunjuk konsorsium pemenang lelang pengembangan Bandara Komodo, yakni PT Cardig Aero Service (CAS) bersama Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd. Penandatanganan nota kesepahaman pengembangan Bandara Komodo akan dilaksanakan pada 7 Februari mendatang.

Setelah pengembangan selesai, Bandara Komodo bisa menampung 4 juta penumpang per tahun. Sedangkan kapasitas kargo mencapai 3.500 ton pada 2044. Landasan pacu diperpanjang dari 2.250 meter menjadi 2.750 meter. Luas apron ditambah menjadi 20.200 meter persegi dan terminal domestik diperluas menjadi 6.500 meter persegi. Ada pula pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, "Serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya," kata Budi.

Kementerian Perhubungan juga akan membangun pelabuhan khusus logistik di Waikelambu, Kecamatan Komodo. Pelabuhan baru itu berjarak 15 kilometer dari pelabuhan yang ada saat ini. Pelabuhan logistik ini memiliki kapasitas 100 ribu twenty equivalent units (TEUs). **EGI ADYATAMA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI | FERY FIRMANSYAH**

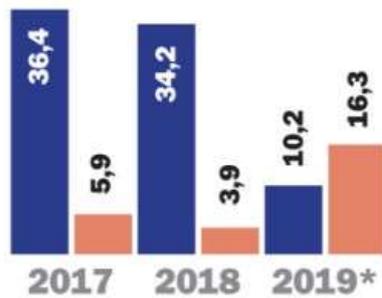
## Memoles Jalan demi Presiden

Menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Labuan Bajo, Ahad lalu, pemerintah Nusa Tenggara Timur memoles Jalan Trans Flores menuju kawasan wisata super-prioritas tersebut. Salah satunya ruas jalan Aegela-Gako di Kabupaten Nagekeo, yang digarap PT Agogo Golden Grup. Pelapisan jalan sepanjang 3,9 kilometer dengan *hotmix* ini memakai anggaran pemerintah pusat senilai Rp 18 miliar.

Pejabat pembuat komitmen proyek ini, Donatus Nelo, mengatakan ada empat titik yang dibongkar karena tertimbun lumpur. "Kami juga membongkar lapisan ACBC," kata dia, kemarin. Kontraktor pelaksana, Yani Karbonila, mengatakan pelapisan jalan sudah mencapai 1,3 kilometer. Sisanya dikerjakan selama 90 hari kerja.

### Investasi Pengembangan Kawasan Wisata Labuan Bajo (US\$ Juta)

■ MODAL ASING  
■ INVESTASI DOMESTIK



YOHANES SEO (FLORES) | YOHANES PASKALIS PAE DALE  
SUMBER: KEMENTERIAN PARIWISATA